

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2023

Nomor 524/DPKH-SEKR/II/2024/0725
TANGGAL 26 FEBRUARI 2024



**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**



Jl. Pattimura No. 2 Pekanbaru



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pekanbaru, Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA

Pembina Utama Muda

NIP 19710729 199302 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199002 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Sarana dan Prasarana	7
1.5. Fungsi dan Tugas	8
1.6. Aspek Strategis Organisasi	11
1.7. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	12
1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja	21
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	23
2.4. Instrumen Pendukung	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 . Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	30
3.2. Realisasi Anggaran.....	67
BAB IV. PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran Tindak Lanjut	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (orang).....	6
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (orang).....	6
Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (orang)	6
Tabel 1.6. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	7
Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau	13
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	18
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024	18
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024	20
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau	22
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023.....	32
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 Dan 2022.....	33
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra.....	35

Tabel 3.5. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg).....	36
Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi	38
Tabel 3.7. Pelayanan Kesehatan Hewan	47
Tabel 3.8. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran	53
Tabel 3.9. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	54
Tabel 3.10. Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis ke-1.....	55
Tabel 3.11. Program/Kegiatan yang mendukung terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sasaran strategis ke-2).....	61
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023	67
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2023	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.	5
Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Gambar 1.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (orang)	6
Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada masing-masing Bidang/UPT	6
Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional tertentu.....	7
Gambar 2.1. Tampilan aplikasi ISIKHNAS	24
Gambar 2.3. Tampilan Isikhnas di layar komputer	25
Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Tahun 2020-2023	33
Gambar 3.2. Grafik Status Kesehatan Hewan Tahun 2020-2023	34
Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Ruminansia dan Unggas	36
Gambar 3.4. Pelaksanaan Inseminasi Buatan	39
Gambar 3.5. Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Mutu Pakan	43
Gambar 3.6. Pelayanan Medik di UPT LVKH	64
Gambar 3.7. Pengambilan Sampel Pullorum	64
Gambar 3.9. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dengan vaksinasi ternak	65
Gambar 3.9. Pelaksanaan Penanggulangan PMK	66

BAB. I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Fungsi dan Tugas
4. SDM Organisasi
5. Sarana Prasarana
6. Aspek Strategis Organisasi
7. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi
8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Riau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga Perubahan Rencana Strategis tahun 2019-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 1. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Produksi Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Budidaya Ternak.
3. Bidang Agribisnis Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kawasan; Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan; serta Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
4. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri atas : Seksi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; serta Seksi Kalemagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Hygiene Sanitasi; Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
6. UPT Rumah Sakit Hewan, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner.
7. UPT Inseminasi Buatan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
8. UPT Laboratorium Pakan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak
9. Kelompok Pejabat Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

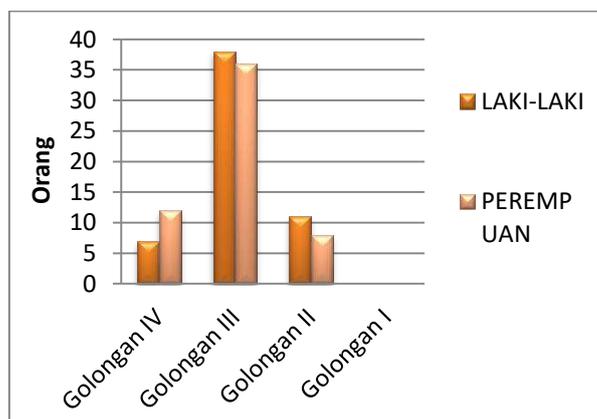


1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2023 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 302 orang yang terdiri dari 120 orang ASN dan 182 orang Non ASN. Rincian ASN terdiri dari 19 orang pejabat struktural, 54 orang pejabat fungsional tertentu, 47 orang pejabat fungsional umum. Sedangkan THL terdiri dari 57 orang di Sekretariat dan Bidang, 125 orang di UPT. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

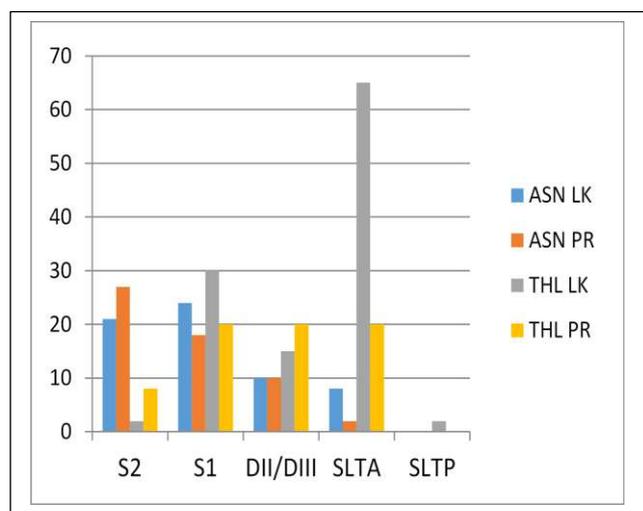
NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	11	14	25
2	Golongan III	43	35	78
3	Golongan II	9	8	17
4	Golongan I	0	0	0
TOTAL		63	57	120



Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

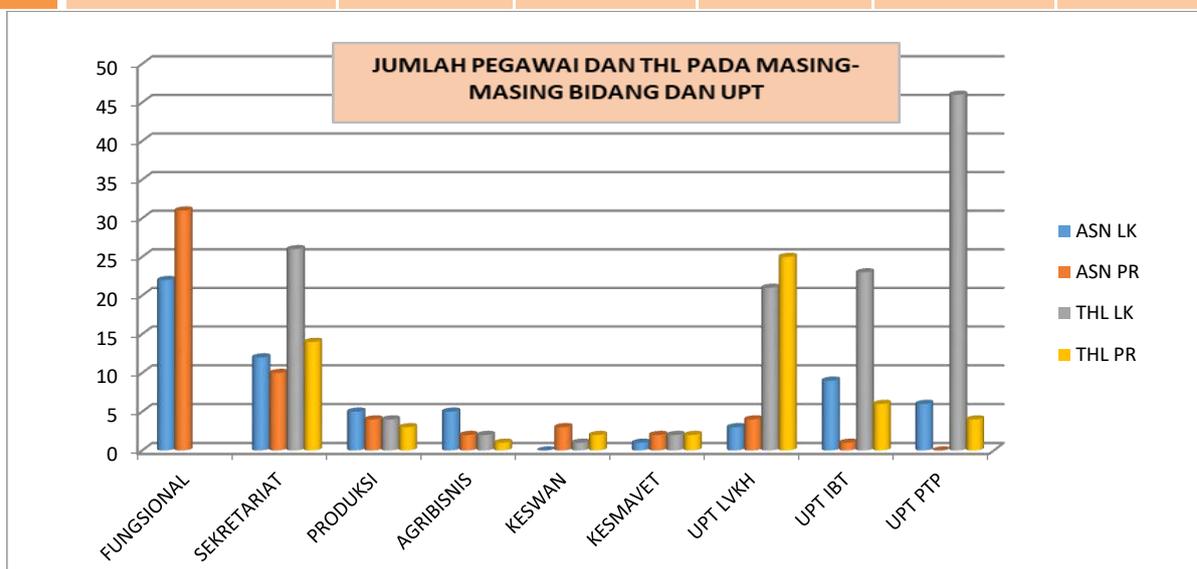
No	Pendidikan	ASN		THL		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	S2	21	27	2	8	58
2	S1	24	18	30	20	92
3	D II/III	10	10	15	20	55
4	SLTA	8	2	65	20	95
5	SLTP	0	0	2	0	2
6	SD	0	0	0	0	0
Total		63	57	114	68	302



Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (Orang)

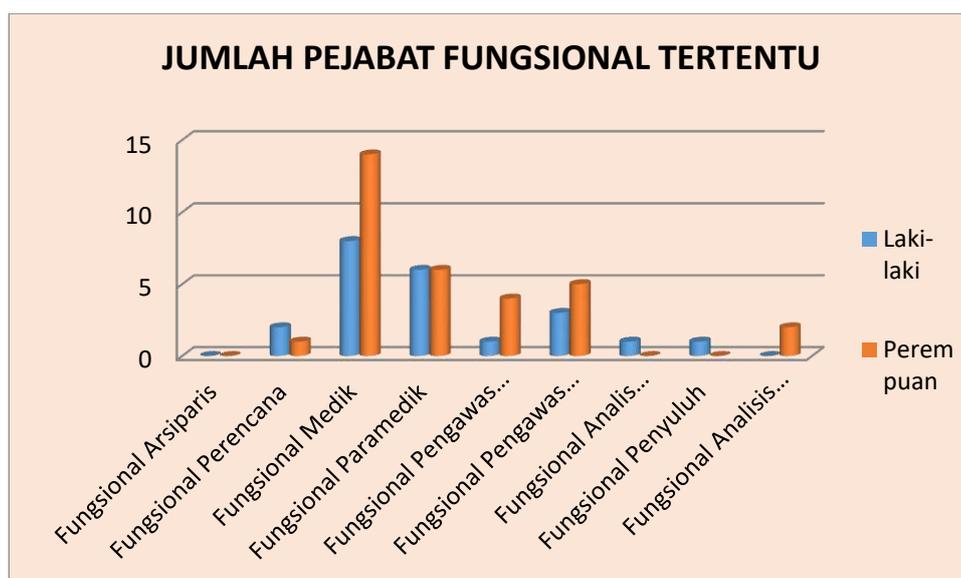
NO	BIDANG/UPT	ASN		THL		JUMLAH
		ASN (LK)	ASN (PR)	THL (LK)	THL (PR)	
1	FUNGSIONAL	13	25	0	0	38
2	SEKRETARIAT	13	8	16	11	48
3	PRODUKSI	5	4	4	3	16
4	AGRIBISNIS	6	2	2	1	11
5	KESWAN	3	4	1	3	11
6	KESMAVET	1	6	2	2	11
7	UPT. LVKH	3	4	7	20	34
8	UPT. IBT	7	1	11	5	24
9	UPT. PTP	5	2	23	0	30
	JUMLAH	63	57	125	57	302



Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Tahun 2023 (Orang)

Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	0	0	0
2	Fungsional Perencana	2	1	3
3	Fungsional Medik	8	14	17
4	Fungsional Paramedik	6	6	12
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	1	4	5
6	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	3	5	8
7	Fungsional Analisis kebijakan	1	0	1
8	Fungsional Penyuluh	1	0	1
9	Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian	0	2	2
	Total	22	32	54



Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

1.4. Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel.1.6. Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Jelek
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	5	5	
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	8	6	2
4	Bangunan Gudang Instalansi	5	5	
5	Gedung Pemotong Hewan Permanen	2	2	
6	Aula	2	2	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	

10	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	27	27	
13	Kendaraan Roda 3	8	3	5
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3
16	Sapi Bull	27	17	10
17	Induk Sapi	81	81	
18	Komputer PC	106	97	9
19	Note Book	24	11	13
20	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023

1.5. Fungsi dan Tugas

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Produksi Peternakan

Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Budidaya Ternak, Seksi Perbibitan Ternak, dan Seksi Pakan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Produksi Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Produksi Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Higiene Sanitasi, Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan

Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Agribisnis Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi ke tiga yakni mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan Pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK.

Sub sektor peternakan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, kontribusi sub sektor peternakan yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan

dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Riau tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Undang- undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH, perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Riau sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan terutama kawasan integrasi sapi-sawit dengan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.

1.7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama beberapa tahun terakhir masih lamban. Produksi daging terutama produksi daging ruminansia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan daging dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Saat ini pemenuhan kebutuhan daging ruminansia terutama sapi masih dominan didatangkan dari luar. Dari total produksi daging ruminansia di Provinsi Riau tahun 2022, produksi daging ruminansia lokal hanya sebesar 24%, selebihnya merupakan ternak yang didatangkan dari luar dan dipotong di Provinsi Riau. Dan untuk memenuhi kebutuhan daging ruminansia disamping daging segar juga dipenuhi dari daging beku yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Rendahnya produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau salah satunya dikarenakan jumlah populasi ternak yang masih sedikit. Peningkatan populasi ternak di Riau pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, penerapan teknologi tepat guna dilapangan masih minim, *Good Farming Practice* tidak diterapkan dengan baik, dan penataan kelembagaan peternakan belum optimal.

Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi.

Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana

		belum memadai	
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab I berisi :

1. Rencana Strategis Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Anggaran 2021
4. Instrumen Pendukung

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang peternakan, serta memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan tahun-tahun sebelumnya, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2024 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 Kepala Daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan dinas yakni **Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi

pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)
		Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)
			Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
Tujuan PD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	1.Meningkatnya produksi daging	Peningkatan populasi ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kelahiran - Penyediaan Pakan Berkualitas - Penyediaan Bibit ternak berkualitas - Penyediaan indukan dan pejantan berkualitas
		Pengembangan SDM dan kelembagaan peternak	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Penyuluhan kepada Kelompok Peternak - Memfasilitasi permodalan

			kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan
		Peningkatan prasarana peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan prasarana produksi peternakan - Menyediakan prasarana UPT
	2. Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penurunan angka kematian hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Veteriner - Pengamatan penyakit hewan - Pengawasan Peredaran Obat Hewan - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan - Pembinaan kelembagaan keswan
		2. Peningkatan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan - Meningkatkan Kompetensi Petugas Pelaksana Kesmavet

2.1.3. Program Kegiatan

Rencana Program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2019-2024) sudah disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program Utama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Penyediaan dan Pengemabangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak
2	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang membentuk korporasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase angka kematian ternak - Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Program Kegiatan Dinas Peternakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada DPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program prioritas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri 4 program yaitu :
 - a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Penyuluhan Pertanian
- 2) Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - b) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - c) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d) Penataan Prasarana Pertanian

- e) Penjaminan Kesehatan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - f) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- 3) Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebanyak 1 program dengan 4 kegiatan, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan :
- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Riau juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen.

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun telah ditetapkan perjanjian kinerja namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kondisi pergantian atau mutasi pejabat atau perubahan alokasi, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan. Dengan perkembangan keadaan, target kinerja produksi daging mengalami perubahan dan pada perjanjian kinerja perubahan target Nilai SAKIP dinas juga dicantumkan, dengan rincian perubahan perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SASARAN STRATEGIS PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN	TARGET PERUBAHAN 2022
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	62.303 Ton	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	75.514 Ton
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan (%)	97,30%	Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase status kesehatan hewan (%)	97,30%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%
3				Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Nilai SAKIP	78

Pada tahun 2023, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 15 indikator kinerja kegiatan. Indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut juga mendukung tercapainya IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

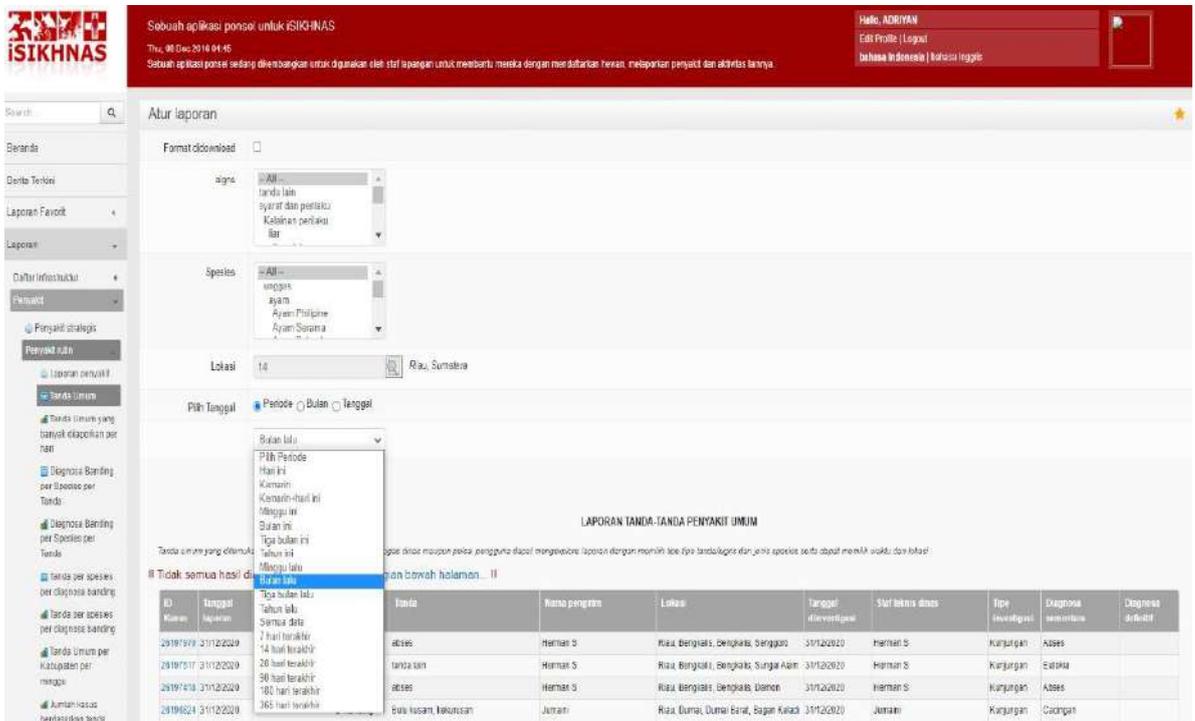
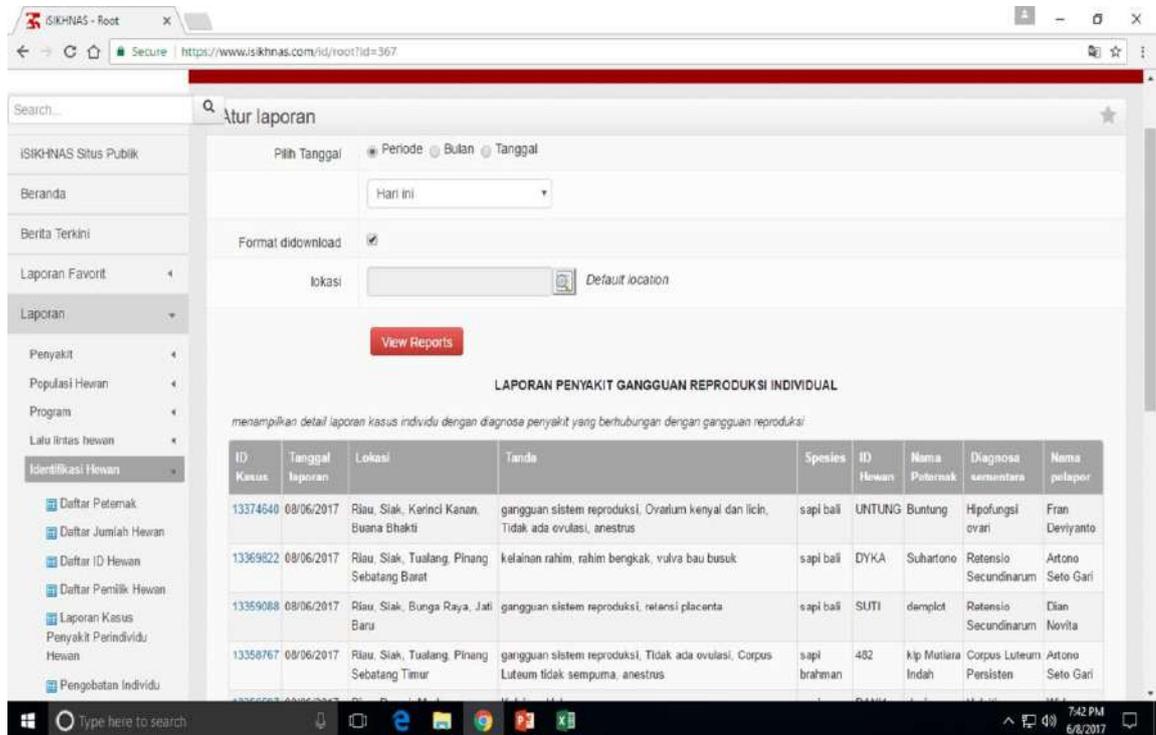
Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 47.129.192.054,- melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp53.229.027.991,-. Sedangkan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.14.157.802.000 ,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.12.888.725.000,-.

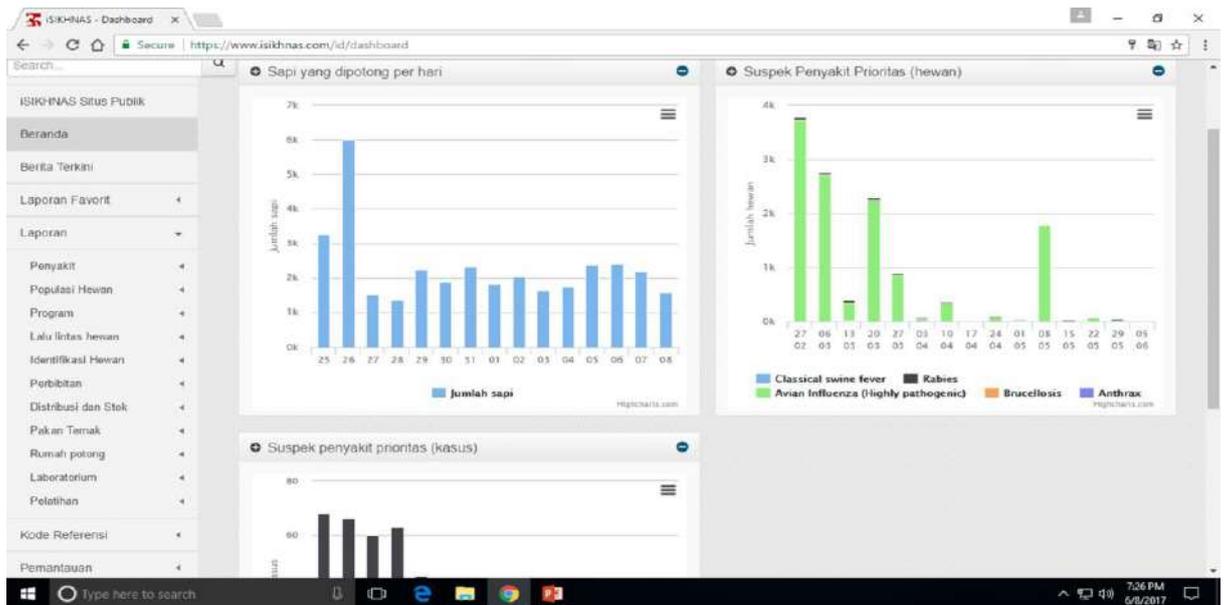
2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung beberapa instrumen, yaitu dengan pengembangan aplikasi iSIKHNAS. ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari Petugas lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. iSIKHNAS menggunakan pesan SMS dari telepon genggam Petugas Lapangan yang melaporkan sewaktu selesai melakukan pelayanan dalam bentuk pengamatan, pengobatan, pelayanan inseminasi Buatan, Pemeriksaan kebuntingan, pelaporan kelahiran dan lain-lain. Data yang sudah dikirim dari HP Petugas Lapangan masuk ke system aplikasi iSIKHNAS dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang memerlukannya. Sistem akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis, dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram, dan, yang sangat penting, sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan penyakit. iSIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi, guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Dengan menggunakan iSIKHNAS, dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta dengan data lalu-lintas hewan atau laporan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi, dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu para pengambil kebijakan di berbagai

tingkat, juga baik bagi semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan.

Gambar 2.2. Tampilan aplikasi iSIKHNAS





Gambar 2.3. Tampilan iSHIKHNAS di layar komputer

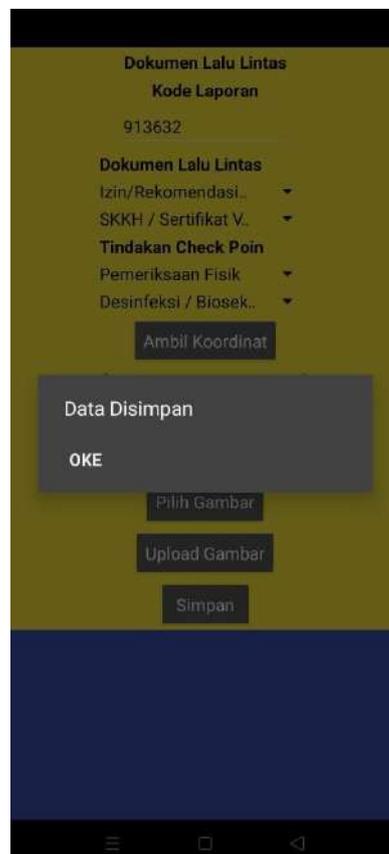
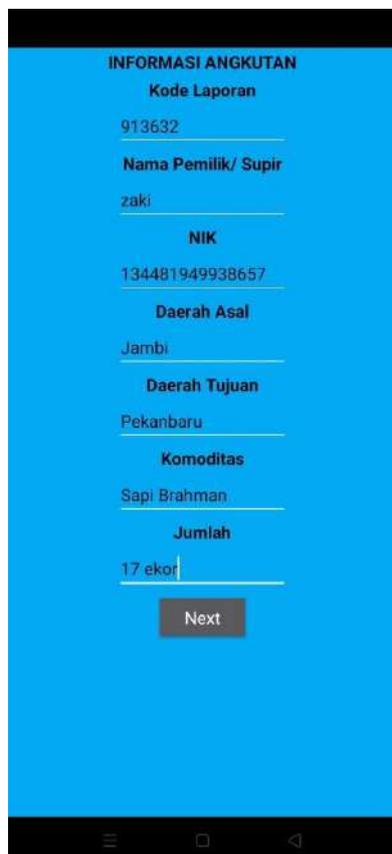
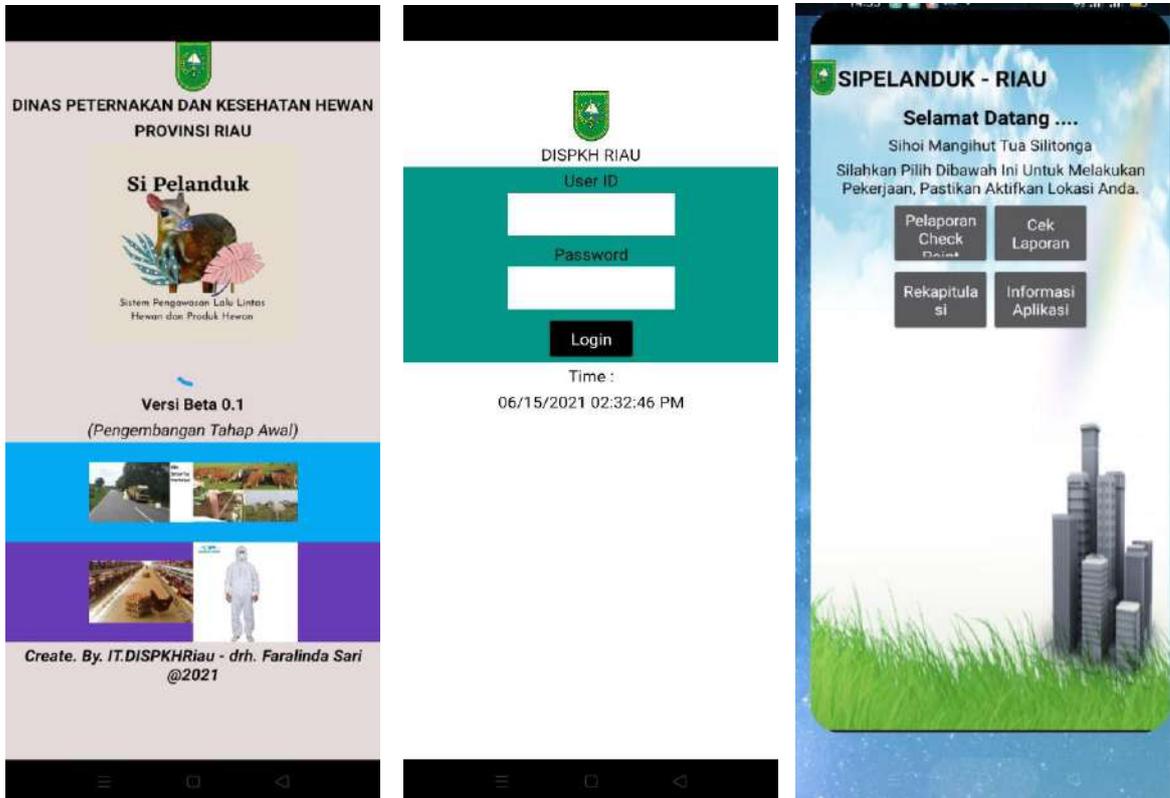
Posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai menyebabkan rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalu lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar. Tingginya lalu lintas hewan dan produk hewan masuk dan keluar ke Provinsi Riau membutuhkan pengawasan di titik-titik perbatasan dengan Provinsi luar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki 5 pos check point di 5 titik yang berbatasan langsung dengan Provinsi tetangga, yang terletak di kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kampar. Petugas check point melakukan pelaporan manual, yang dikirimkan setiap bulannya.

Untuk mempermudah pelaporan lalulintas ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai mengembangkan aplikasi “SIPELANDUK” (**S**istem **P**engawasan **L**alu Lintas hewa**N** dan Pro**D**UK Hewan). Data dapat dilakukan secara elektronik melalui input di aplikasi SIPELANDUK di handphone petugas check point, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara real time.

Sistem ini mempermudah pengawasan bagi koordinator check point terhadap kinerja petugas check point, karena setiap melakukan input data dapat terlihat

titik koordinat GPS. Disamping itu data yang diinput akan otomatis tersimpan di database Provinsi, dan dapat diakses rekapitulasinya oleh kabupaten.

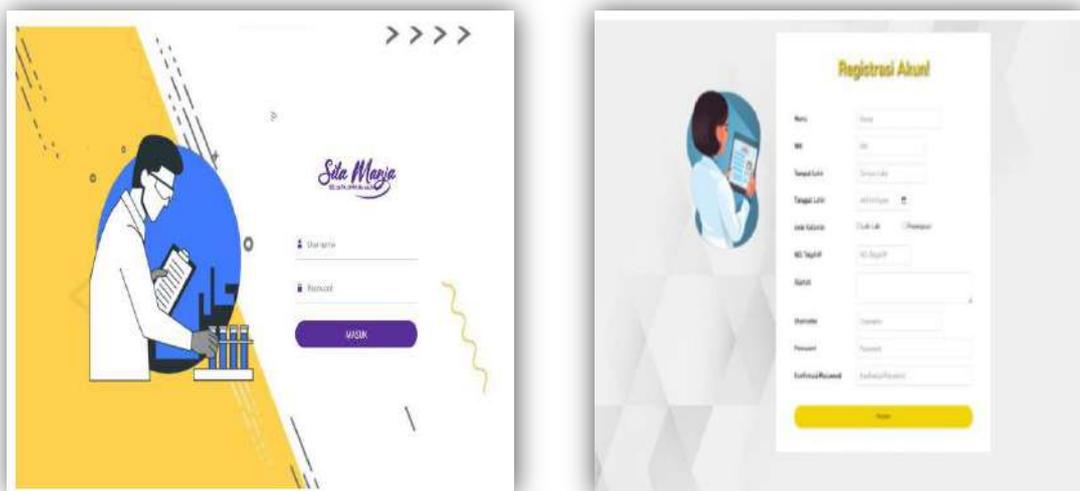
TAMPILAN APLIKASI SIPELANDUK

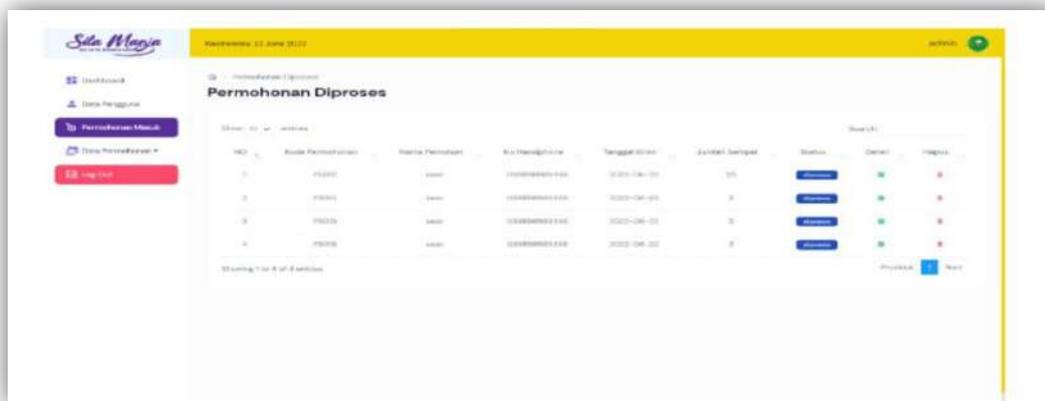
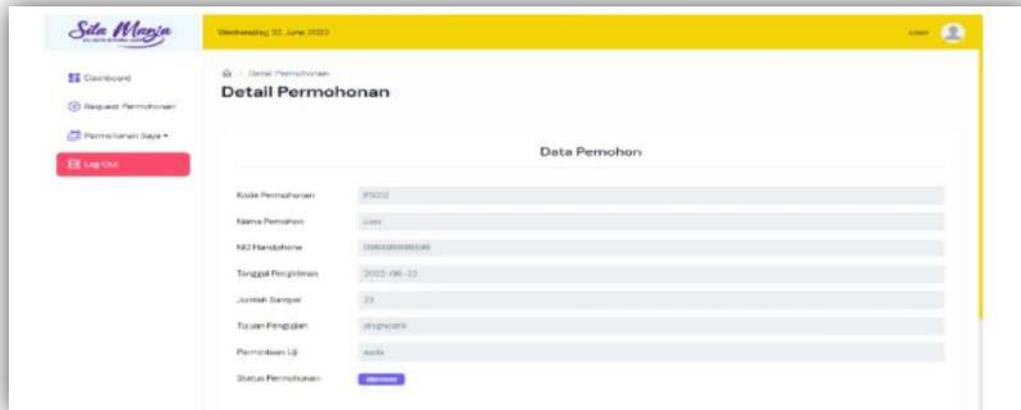


Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut.

Aplikasi lain yang juga dikembangkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah "SITA MANJA". SITA MANJA (Isi daTA diMANa saJA) adalah sebuah sistem informasi pendaftaran sampel laboratorium veteriner secara online yang digunakan pengguna layanan laboratorium veteriner untuk melakukan pendaftaran sampel yang akan mereka kirim ke laboratorium veteriner UPT LVKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online ini maka pengguna layanan akan lebih mudah untuk mengirim data sampel dan petugas penerima sampel dapat bekerja lebih efektif karena semua sampel yang diterima sudah dilengkapi dengan data yang diperlukan.

TAMPILAN APLIKASI SITA MANJA





Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga mengelola website, yaitu : <http://dispkh.riau.go.id>. Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat peternak dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan peternakan. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

3.1. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Untuk indikator Angka produksi daging ruminansia lokal, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
- (2). Pada indikator jumlah persentase status Kesehatan hewan, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

3.1.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator Produksi daging. Pada indikator kinerja produksi daging dihitung dari penghitungan jumlah pemotongan ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Ras Pedaging, dan Ayam Buras) dikalikan dengan parameter berat karkas masing-masing ternak tersebut.

Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak diwilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu. Produksi daging menunjukkan jumlah daging yang diproduksi pada tahun ke-t.

$$PD = K0 \times St$$

Keterangan:

PD = Produksi Daging

K0 = Berat karkas

St = Jumlah pemotongan ternak (tercatat dan tidak tercatat) pada tahun t

Sedangkan Untuk mengukur sasaran Strategis II yakni Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Indikator Persentase status kesehatan hewan menunjukkan tingkat terkendalinya penyakit hewan di suatu wilayah. Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dihitung dengan rumus jumlah hewan sembuh dibagi jumlah hewan sakit yang mendapat pelayanan hewan dikali seratus persen.

$$\text{Persentase Status Kesehatan Hewan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Hewan Sembuh}}{\text{Jumlah Hewan Sakit yang Mendapatkan Pelayanan Hewan}} \times 100\%$$

Sedangkan indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) diukur dengan menghitung jumlah produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dibagi jumlah produk pangan asal hewan yang beredar di kali seratus persen.

$$\text{Persentase Produk Hewan yang ASUH (\%)} = \frac{\text{Jumlah produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner)}}{\text{Jumlah produk pangan asal hewan yang beredar}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	62.303 Ton	75.514 Ton	77.838 Ton*	103,08%	Sangat Tinggi
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	97,3%	97,3%	97,2%	99,9%	Sangat Tinggi
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%	5%	4,48%	89,6%	Tinggi

*Angka Sementara

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 untuk sasaran strategis I : Meningkatnya produksi daging dengan indikator Produksi Daging.

Pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023, target produksi daging sesuai Renstra sebesar 62.303 Ton. Dari hasil evaluasi produksi daging tahun 2022 sebesar 77.730 Ton, maka target produksi daging untuk tahun 2023 direvisi menjadi 75.514 Ton. Realisasi produksi daging angka sementara sebesar 77.838 Ton dengan tingkat capaian 103,08%. Angka tetap produksi daging nanti didapat setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi data pada bulan April 2024.

Pada sasaran strategis II : Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan, realisasinya 97,2% dengan tingkat capaian kinerjanya 99,9% dengan kategori capaian kinerja Sangat Tinggi. Untuk indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH), realisasinya 4,48% dengan tingkat capaian 89,6% dengan kategori capaian tinggi.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

Realisasi tahun 2023 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	59.912 Ton	65.408 Ton	109,17%	61.096 Ton	77.730 Ton	127,23%	75.514 Ton	77.838 Ton*	103,08%
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase status kesehatan hewan (%)	95,90%	94,10%	98,12%	96,60%	94,90%	98,24%	97,3%	96,47%	99,15%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	-	-	-	5%	4,32%	86,40%	5%	4,48%	89,6%

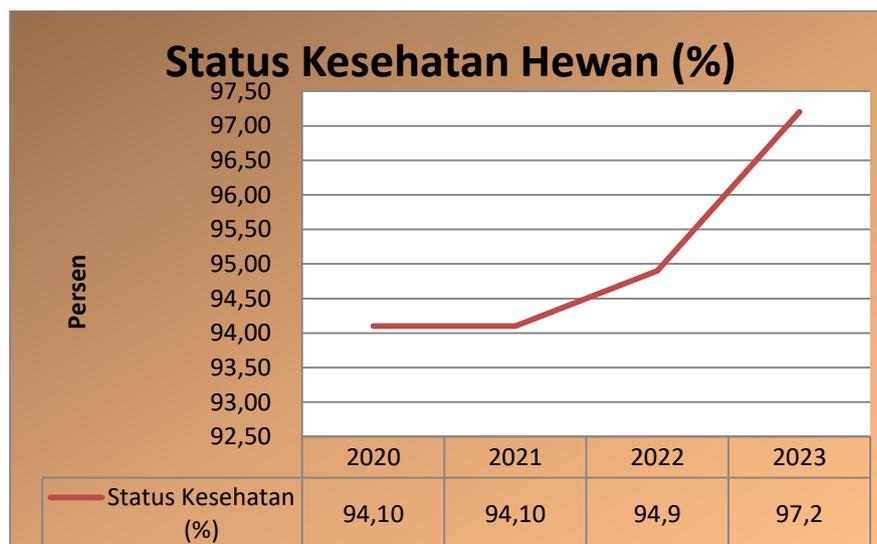
Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa produksi daging tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Sedangkan bila dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja tahun 2023 lebih rendah dari pada tingkat capaian kinerja tahun 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan tahun 2021 dan 2022 target kinerja hanya mengacu pada Renstra, tidak direvisi targetnya walaupun tahun sebelumnya capaiannya telah melebihi target. Pada tahun 2023 target kinerja di Perjanjian Kinerja direvisi dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Angka sementara produksi daging tahun 2023 diperoleh berdasarkan laporan pemotongan ternak di Rumpah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas dan Tempat Pemotongan Hewan yang dilaporkan Petugas dan dimasukkan datanya di ISHIKHNAS.



Gambar 1. Grafik Produksi Daging Tahun 2020-2023

Produksi daging berkaitan dengan permintaan pasar. Semakin besar permintaan pasar maka semakin banyak ternak yang di potong. Pada tahun 2023 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 27.675 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2023 telah lahir sebanyak 21.951 ekor ternak sapi.

Pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 94,9% mengalami kenaikan dari tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,8%. Tahun 2023 Persentase Status Kesehatan Hewan sebesar 97,2% naik sebesar 2,42% dari tahun 2022.



Gambar 2. Grafik Status Kesehatan Hewan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan hewan. Provinsi Riau mampu menekan jumlah hewan yang sakit dengan pelayanan pengobatan dan vaksinasi sehingga status kesehatan hewan menjadi meningkat. Sedangkan pada indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) capaian kinerja tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, namun perbedaannya sangat kecil hanya 0,16%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra yakni target sampai dengan tahun 2024. Capaian renstra untuk indikator produksi daging ruminansia lokal dan persentase status Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel.3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d.Tahun 2023	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	246.846 Ton	220.975 Ton	89,52%
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	98%	97,2%	99,18%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	15%	8,8%	58,67%

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian renstra untuk indikator produksi daging adalah sebesar 89,52% sampai dengan tahun 2023. sedangkan untuk indikator status kesehatan hewan capaian realisasi Renstra 99,18%. Pada indikator Persentase Produk Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) capaian sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir renstra adalah sebesar 58,67%. Capaian ini masih jauh target yang akhir renstra yang telah ditetapkan. Namun untuk indikator Produksi Daging dan Persentase Status Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau optimis akan dapat mencapai target akhir renstra mengingat tahun 2023 merupakan tahun ke empat penerapan Renstra Perubahan periode 2019-2024 sehingga masih ada waktu maksimal satu tahun lagi untuk mencapai target akhir renstra.

3.1.4. Analisis Capaian Kinerja/Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

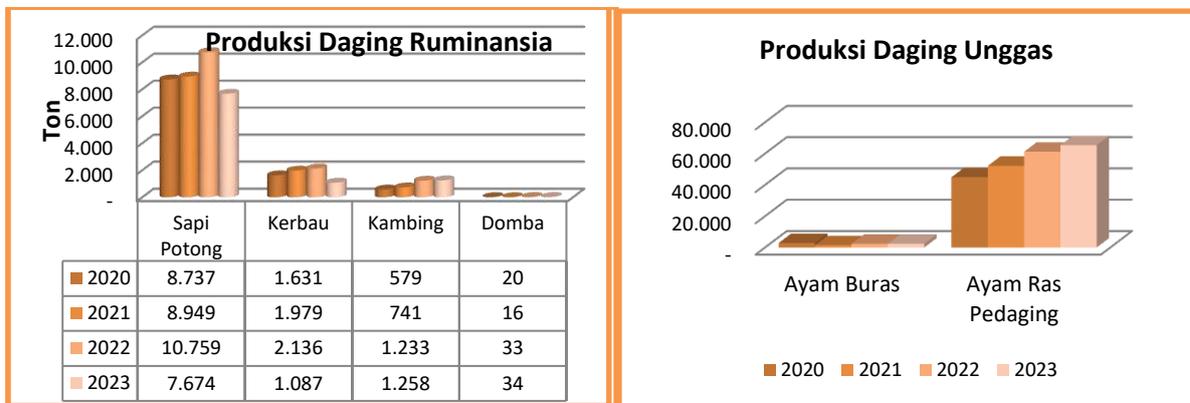
A. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Produksi Daging

Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator Produksi daging. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 produksi terus mengalami peningkatan dan tahun 2023 target produksi daging dapat terpenuhi bahkan melebihi target hingga mencapai 103,08%. Adapun produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dapat dilihat pada tabel dan gambar grafik berikut.

Tabel.3.5. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)

Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023*
Sapi Potong	8.737.301	8.948.696	10.759.381	7.674.464
Kerbau	1.631.055	1.978.715	2.135.773	1.087.471
Kambing	578.579	741.404	1.232.929	1.257.600
Domba	19.879	15.583	33.332	34.000
Ayam Buras	2.869.213	1.481.144	2.353.334	2.400.000
Ayam Ras Pedaging	44.915.106	52.242.136	61.214.925	65.385.043
Jumlah	58.751.133	65.407.678	77.729.674	77.838.578

*Angka Sementara

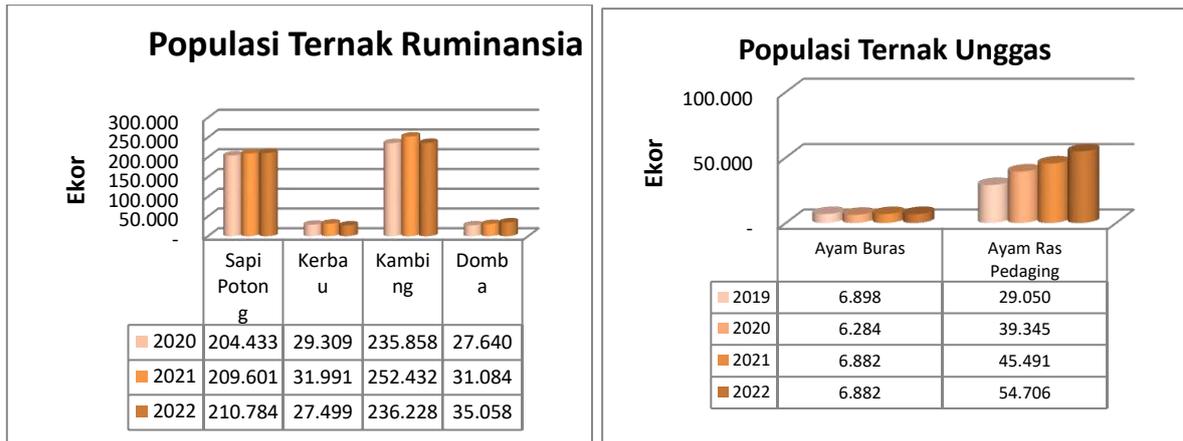


Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Ruminansia dan Unggas

Dari Tabel 3.5. dapat dilihat bahwa produksi daging Tahun 2023 di Riau sebanyak 77.838.578 kg atau 77.839 Ton. Produksi daging ruminansia yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba sebanyak 10.053,54 Ton.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



Gambar 3.4. Grafik Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas

Dari gambar 3.4. dapat dilihat grafik trend jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Namun pada tahun 2022, populasi ternak mengalami sedikit penurunan terutama pada ternak kerbau dan kambing. Berdasarkan angka Tahun 2022, Populasi Sapi tahun 2021 dari 209.601 ekor meningkat menjadi 210.784 ekor pada tahun 2022. Populasi kerbau tahun 2021 sebanyak 31.991 ekor turun menjadi 27.449 ekor pada tahun 2022. Populasi kambing tahun 2021 sebanyak 252.432 ekor menurun menjadi 236.228 ekor pada tahun 2022 dan populasi domba meningkat pada tahun 2022 menjadi 35.058 ekor dari sebelumnya 31.084 ekor.

Pada ternak unggas, populasi ayam buras mengalami penurunan populasi dari 6.882.281 ekor pada tahun 2021 menjadi 6.426.495 ekor pada tahun 2022, sedangkan populasi ayam ras pedaging mengalami kenaikan dari 45.490.839 ekor pada tahun 2021 menjadi 54.706.154 ekor pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 27.675 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2023 telah lahir sebanyak 21.951 ekor. Pelaksanaan IB tergantung dari kesiapan ternak (waktu birahi ternak) dan pelaksanaan IB tidak serentak sehingga yang sudah di IB sebagian masih bunting dan akan lahir pada tahun 2024.

Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi (Ekor)

NO	KABUPATEN	TARGET AKSEPTOR IB	CAPAIAN AKSEPTOR IB	%	TARGET LAHIR IB DAN KA	CAPAIAN LAHIR	%
1	KUANTAN SINGINGI	6.160	5.914	96%	4.546	4.763	105%
2	INDRAGIRI HULU	6.500	5.531	85%	4.797	3.599	75%
3	INDRAGIRI HILIR	900	515	57%	664	508	77%
4	PELALAWAN	2.040	407	20%	1.506	527	35%
5	SIAK	3.050	2.176	71%	2.251	2.034	90%
6	KAMPAR	6.950	5.290	76%	5.129	4.580	89%
7	ROKAN HULU	6.700	4.053	60%	4.945	2.824	57%
8	ROKAN HILIR	1.300	497	38%	959	255	27%
9	BENGKALIS	2.500	1.781	71%	1.845	1.328	72%
10	KEP MERANTI	300	82	27%	221	80	36%
11	PEKANBARU	100	44	44%	74	6	8%
12	KOTA DUMAI	1.000	1.156	116%	738	1.447	196%
JUMLAH		37.500	27.446	73%	27.675	21.951	79%

Sumber Data : iSIKHNAS 2023, data diolah

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa target akseptor IB sebanyak 37.500 ekor. Dari target 37.500 ekor yang akan di IB, terealisasi IB nya sebanyak 27.446 ekor sapi. Selama tahun 2023 ditargetkan akan lahir 27.675 ekor yang merupakan hasil dari Inseminasi Buatan dan Kawin alam. Target kelahiran ini merupakan terget dari sebageian hasil IB tahun 2022 dan sebagian hasil IB tahun 2023. Hal ini karena sapi mempunyai masa bunting selama 9 bulan, jadi bukan berarti bahwa sapi yang lahir tahun 2023 merupakan hasil IB tahun 2023 saja melainkan juga hasil dari IB tahun 2022. Dari 27.675 ekor yang ditargetkan akan lahir, sampai dengan akhir Desember 2023 terealisasi sebanyak 21.951 ekor, selebihnya ternak yang saat ini bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2024.

Dalam upaya peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung dari anggaran APBD Riau dan dari APBN dalam bentuk *sharing budget* untuk pembelian semen beku, Fasilitas alat dan bahan IB, Pengadaan N2 Cair, Operasioanal N2 Cair, operasional IB, Operasional Pemeriksaan Kebuntingan, Operasional Kelahiran, Pembelian hormon dan vitamin, dan belanja jasa kegiatan lainnya.

Selain dampak terhadap investasi, pelaksanaan IB juga memberikan dampak lain seperti: peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan, meningkatkan minat dan motivasi

masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.



Gambar 3.4. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)



Gambar.3.5. Anak Sapi Hasil Inseminasi Buatan

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan populasi melalui IB diantaranya jangkauan pelayanan yang sangat luas dengan jarak tempuh yang jauh bagi Petugas IB untuk dapat mendatangi ternak yang akan di IB. Kendala lainnya yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan peternak dalam mengenal tanda-tanda birahi pada ternaknya dan tidak jarang peternak terlambat mengetahui

ternaknya yang dalam keadaan birahi sehingga sewaktu memanggil Petugas IB dan Petugas IB telah datang, ternak yang akan di IB sudah tidak dalam keadaan birahi sehingga IB tidak dapat dilakukan.

Keberhasilan kebuntingan baik yang dari inseminasi buatan maupun kawin alam tidak terlepas juga dari pemenuhan pakan ternak yang berkualitas. Kebanyakan ternak dipelihara dengan pemberian pakan yang seadanya tanpa memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak untuk dapat bunting dan melahirkan. Hal ini terkait juga dengan pengetahuan peternak yang masih minim tentang pakan ternak yang berkualitas dan keterbatasan modal peternak untuk membeli pakan ternak yang berkualitas.

Dalam mengukur kinerja program dan kegiatan yang berkaitan dalam pencapaian peningkatan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi iSHIKHNAS yang datanya *realtime* dilaporkan oleh Petugas Lapangan. Berbagai data dari hasil pelaporan Petugas Lapangan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan yang mendukung kebijakan dan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan adanya aplikasi iSHIKHNAS, data jumlah ternak yang di IB, data ternak yang bunting, data jumlah populasi, data pemotongan ternak yang berkaitan langsung dengan produksi daging serta data lainnya yang berkaitan dengan peternakan dan Kesehatan hewan yang dilaporkan oleh Petugas, dapat di akses kapan saja dan data terupdate setiap saat.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai melakukan pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang diaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan.

Dalam menghadapi kendala peningkatan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging, solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- Untuk mengatasi luasnya jangkauan pelayanan IB oleh Petugas, maka dilakukan sentralisasi atau intensifikasi IB melalui zonasi sentra pengembangan ternak.

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas IB, Petugas PKB dalam memberikan pelayanan IB, PKB dan penanganan gangguan reproduksi ternak
- Melakukan sinkronisasi IB, dimana ternak-ternak sapi dikumpulkan pada suatu tempat dan dilakukan IB secara serentak
- Memberi pembinaan terhadap kelompok untuk penerapan prinsip-prinsip sistem perbibitan ternak
- Memberikan pembinaan dan pemantauan kepada peternak/kelompok akan penting pakan dalam usaha budidaya ternak.
- Penambahan petugas teknis peternakan sehingga petugas dapat membina kelompok secara maksimal
- Peningkatan biaya operasional pelaporan Petugas sehingga petugas pelaksana pelapor termotifasi untuk melaporkan data secara realtime melalui iSHIKHNAS.

Selain peningkatan populasi ternak dengan Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam, peningkatan produksi dan produktifitas ternak juga dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak. Pakan memegang peranan penting dalam satu usaha peternakan, dimana hampir 70% biaya yang dibutuhkan dalam suatu usaha peternakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ternak.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan pakan dan menjaga mutu pakan diperlukan penerapan sistem manajemen mutu pakan yang diawali mulai dari pengadaan bahan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan sampai pakan diberikan kepada peternak. Pakan yang diproduksi baik di tingkat produsen besar maupun di tingkat kelompok yang dimanfaatkan untuk kalangan sendiri atau diperdagangkan harus berpedoman pada persyaratan yang tertera dalam Permentan No. 22 Tahun 2017 dan Kepmentan No. 240/Tahun 2003. Oleh karena itu dalam penerapannya di lapangan perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap pembuatan untuk menjamin agar pakan yang diproduksi yang diberikan kepada ternak serta diperdagangkan tetap terjaga mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dipersyaratkan.

Berdirinya Unit-unit Pengolahan pakan ternak dan Bank Pakan di tingkat kelompok ternak yang berperan sebagai produsen pakan olahan sendiri, diharapkan menjadi cikal bakal pembentukan pabrik pakan yang dapat menghasilkan pakan komersil untuk diperdagangkan. Untuk itu perlu didampingi dan dilakukan pembinaan agar mutu dan keamanan pakan yang di produksi sesuai dengan standar (*safety Feed to Safety Food*).

Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah dengan melakukan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pakan untuk kelompok-kelompok, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Mutu Pakan dan pemberian bantuan mesin *Chopper* dan drum fermentasi serta bank pakan untuk kelompok- kelompok peternak.



Gambar 3.5. Pembinaan Dan Pengawasan Manajemen Mutu Pakan

Permasalahan lain yang menyebabkan lambatnya peningkatan produksi daging ruminansia di Provinsi Riau adalah dikarenakan :

- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh

ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.

- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi daging ruminansia lokal serta mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang diarahkan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan serta melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.
- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan, melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan serta sinkronisasi IB.
- Memberikan bantuan pakan ternak, dan atau fasilitasi pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
- Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan lokal dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair.
- Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan

- Peningkatan peran swasta dalam pengembangan sapi potong di lahan perusahaan perkebunan sawit melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk meningkatkan populasi sapi potong sehingga ketersediaan daging sapi lokal di Riau dapat terpenuhi

B. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan

Indikator persentase status kesehatan hewan digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis dinas yang II yakni sasaran terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dari Tabel 3.2. dapat diketahui pada capaian Indikator Kinerja Utama yang II yakni Persentase Status Kesehatan hewan tahun 2023 adalah sebesar 97,2% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi dan bisa dikategorikan sudah mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam mencapai target persentase status kesehatan hewan diantaranya karena posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai, menyebabkan rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik. Pada awal tahun 2022, Provinsi Riau dihadapi oleh wabah *Lumpy Skin Disease* (LSD) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 242/KPTS/PK.320/M/2022, tanggal 2 Maret 2022 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022, tanggal : 25 Juni 2022. Penyakit LSD dan PMK merupakan penyakit eksotik yang sebelumnya belum pernah ada atau sudah dibebaskan dari suatu wilayah. Penyakit ini mulai mewabah karena letak Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar khususnya Malaysia sehingga mempunyai resiko maupun peluang yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit eksotik ke Provinsi Riau.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular terutama pada saat terjadi wabah LSD dan PMK. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan penyusunan rancangan kebijakan, program dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan

perundangan dan penegakan aturan-aturan di Bidang Kesehatan Hewan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek dan workshop, sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan *public awareness*, serta penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Keswan dan Kesmavet.

Telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keswan dan Kesmavet melalui Peraturan Gubernur (Pergub) antara lain yaitu Pergub Rabies, Pergub Avian Infuenza, Pergub Brucellosis, SK Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, dan Peraturan Kadis Peternakan tentang Unit Respon Cepat PHMS Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Pengawas Obat Hewan Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Riau, dan SK Gubernur tentang Otoritas Veteriner Provinsi Riau.

Selain itu, kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, Jembrana, SE, PMK, LSD, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak maupun hewan kesayangannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah yang telah dilaksanakan setiap tahun dan yang vaksinasi baru yang mulai dilaksanakan tahun 2022 adalah vaksinasi LSD dan Vaksinasi PMK sebagai akibat mewabahnya penyakit tersebut di Provinsi Riau. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi. Tahun 2023, walaupun penyakit LSD dan PMK tidak menjadi wabah lagi, namun upaya pengendaliannya tetap dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi LSD dan PMK. Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan meliputi pengobatan serta vaksinasi pada ternak besar (Jembrana dan SE). Sedangkan untuk vaksinasi LSD dan PMK dalam pelaksanaannya sudah diakomodir melalui dana APBN.

Pelayanan kesehatan hewan di lapangan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang merupakan pelayanan kesehatan hewan terpadu pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis, petugas lapangan atau kecamatan yang sekaligus menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Sasaran pelayanan kesehatan hewan terpadu antara lain ternak sebagai objek pelayanan dengan lebih diutamakan pada ternak-ternak milik petani yang tergabung dalam kelompok petani ternak di wilayah inseminasi buatan serta masyarakat penerima paket-paket bantuan ternak pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pengetahuan mengenai kegiatan surveilans kesehatan hewan sangat penting untuk petugas kesehatan hewan disemua tingkatan guna menentukan langkah pengambilan kebijakan dalam pencegahan, pengendalian dan atau pemberantasan penyakit hewan. Dengan adanya iSIKHNAS petugas kesehatan hewan disemua tingkatan menjadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memudahkan dalam pelaporan serta pengambilan kebijakan. ISIKHNAS merupakan sistem pelayanan informasi dan pelaporan terpadu bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan produksi peternakan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan ISIKHNAS petugas dapat melaporkan secara realtime, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui situasi penyakit yang ada di lapangan secara cepat. Selain pelaporan penyakit hewan, ISIKHNAS juga memfasilitasi pelaporan pemotongan, IB, Produksi, dan perbibitan.

Tabel. 3.7. Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Indikator	Satuan	Tahun					Jumlah
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	49.296	35.366	45.722	55.560	202.863	388.807
2	Vaksinasi							
	a. Jembrana	Dosis	47.909	22.180	23.251	11.482	7.797	112.619
	b. Rabies	Dosis	40.385	36.858	19.173	11.505	25.074	132.995
	c. SE	Dosis	4.848	3.488	98	605	7.429	32.676
	d. LSD	Dosis	-	-	-	36.719	3.222	39.941
	e. PMK	Dosis	-	-	-	142.033	211.210	353.243
3	Penanggulangan Gangrep	Kasus	3.811	2.026	2.048	2.662	1.097	11.644
4	Pemeriksaan Laboratorium	Sampel	75.486	112.634	114.545	124.056	113.184	539.905

Sumber data : iSHIKHNAS 2023

Dari tabel.3.7 dapat dilihat bahwa tahun 2023 dalam rangka peningkatan persentase status kesehatan hewan berdasarkan laporan yang masuk ke sistem pelaporan iSIKHNAS pelayanan kesehatan telah ditangani sebanyak 202.863 ekor. Pelaksanaan Vaksinasi terhadap sejumlah penyakit antara lain penyakit Jembrana, Rabies, dan Septicemia Epizooticae (SE) telah dilakukan dengan rincian 7.797 dosis vaksin Jembrana pada Sapi Bali, 25.074 dosis vaksin Rabies pada hewan penular Rabies (anjing, kucing kera), dan 7.429 dosis SE pada sapi dan kerbau.

Penanggulangan gangguan reproduksi yaitu kegiatan yang bertujuan menanggulangi gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau agar ternak dapat bereproduksi kembali. Selama 5 tahun terakhir telah ditangani sebanyak 11.644 kasus gangguan reproduksi dan khusus tahun 2023 telah dilaksanakan penanggulangan gangguan reproduksi sebanyak 1.097 kasus.

Bila dicermati secara keseluruhan, upaya meningkatkan status kesehatan hewan menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target adalah :

- a. Belum maksimalnya pelaporan kasus penyakit oleh petugas ke iSIKHNAS, menyebabkan kejadian penyakit tidak dilaporkan secara real time.
- b. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.
- c. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area cek point pada masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area cek point, tidak dapat difungsikan secara optimal.

- d. Masih kurangnya jumlah petugas puskesmas di kabupaten/kota, sehingga diperlukan adanya penambahan Tenaga medis maupun paramedis dari pusat di kabupaten/kota.

Alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan petugas PPV di lapangan melalui SMS Gateway dan iSIKHNAS, sehingga informasi penyakit dapat diketahui dengan cepat, dengan penyampaian pelaporan penyakit dikirimkan dengan tepat waktu atau realtime.
- b. Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan, magang, pertemuan teknis dibidang kesehatan hewan.
- c. Dalam penyediaan sarana prasarana dibidang keswan, maka diharapkan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota, disamping sharing melalui anggaran APBD Provinsi dan APBN pusat, untuk itu perlu koordinasi dan informasi yang baik sehingga kegiatan pelayanan keswan dapat berjalan dengan baik.
- d. Dalam upaya mempertahankan atau mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
- f. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas, maka diupayakan peningkatan sarana puskesmas, SDM (medis, paramedis, Vaksinator, ATR), obat-obatan, kendaraan operasional yang diupayakan melalui anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.

C. Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Indikator Persentase Produk Hewan Yang Aman, Sehat Utuh Dan Halal (ASUH)

Indikator persentase produk hewan yang ASUH merupakan indikator kinerja Utama yang baru yang muncul setelah adanya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berdasarkan Tabel 3.2, realisasi kinerja pada indikator Utama ini sebesar 4,48% dari 5% yang ditargetkan dengan tingkat capaian kinerja 89,6%.

Produk pangan asal hewan berupa daging, susu, telur dan olahannya merupakan salah satu sumber protein hewani yang tidak tergantikan oleh bahan sintetis, produk pangan asal hewan juga merupakan bahan yang sangat mudah rusak (*perisable food*) dan berpotensi menjadi bahaya (*hazardous food*) bagi makhluk hidup dan lingkungan karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Jo. Undang-Undang 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, **Pasal 58 (ayat 1)**, bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi Produk Hewan.

Pasal 58 (ayat 2), pengawasan, pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Pasal 60 (ayat 1,2) setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan

yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pengawasan terhadap unit usaha penyedia produk hewan sangat penting, karena unit usaha merupakan titik awal penentuan kualitas produk hewan, maka penerapan praktik higiene sanitasi, penjaminan keamanan serta mutu produk harus dijalankan secara konsisten menurut aturan/standar operasional yang berlaku. Selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan unit usaha melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. NKV sebagai border utama pengawasan praktik hygiene sanitasi dan keamanan produk hewan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktik nyata dilapangan khususnya unit usaha yang belum memiliki standar higiene sanitasi dan penjaminan keamanan pangan yang benar, maka akan menimbulkan dampak atau resiko buruk bagi mutu dan keamanan produk serta kesehatan manusia dan lingkungan. Selain permasalahan penerapan teknis produksi, faktor biaya produksi serta nilai jual produk akan memicu praktik penyimpangan prinsip-prinsip kesmavet.

Bentuk penyimpangan kesmavet dalam hal penerapan hygiene sanitasi dan keamanan pangan yang masih sering ditemukan yaitu proses penanganan karkas di Rumah Potong Hewan Ruminansia yang dilakukan di lantai atau melakukan pemotongan hewan tempat pemotongan hewan yang tidak resmi, penerapan kesejahteraan hewan terhadap ternak maupun hewan non ternak yang terabaikan, proses pengangkutan produk hewan baik dalam bentuk segar dan beku yang tidak memperhatikan sistem rantai dingin dan ketentuan alat angkut, pencampuran daging sapi segar dengan daging kerbau beku, penjualan daging beku di pasar tradisional dengan tidak menggunakan sistem penyimpan dingin, pengawasan terhadap produk olahan curah yang sulit dilakukan (keterangan masa kadaluarsa produk, jenis dan asal produk, sertifikasi halal dll), ketidak patuhan pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis unit usaha dalam proses pemasukan/pengeluaran produk hewan dan kasus penyimpangan kesmavet lainnya.

Upaya pemerintah provinsi dalam penjaminan hygiene sanitasi, keamanan dan mutu produk hewan di unit usaha adalah melalui sertifikasi kontrol veteriner/NKV,

namun belum banyak unit usaha yang dapat melakukan pemenuhan persyaratan NKV. Pemenuhan kebutuhan produk hewan sebagian besar dipenuhi dari luar Provinsi Riau, sehingga usaha distributor produk hewan dan usaha ritel produk hewan semakin berkembang, sedangkan unit usaha di dalam daerah yang memproduksi produk hewan masih terbatas, terutama unit usaha Rumah Potong Hewan.

Tahun 2023 produk pangan asal ternak yang ASUH hanya 4,48%. Penghitungan pangan yang ASUH berasal dari jumlah produk pangan yang berasal dari unit usaha yang sudah ber NKV. Saat ini jumlah unit Usaha pangan asal ternak yang ber NKV hanya 34 unit usaha. Produk pangan asal ternak yang beredar di Provinsi Riau sebagian besar merupakan daging segar yang berasal dari Rumah Potong Hewan. Jumlah Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) di Provinsi Riau tahun 2024 berjumlah 10 unit (7 unit aktif dan 3 unit non-aktif), dan Tempat Pematangan Hewan Ruminansia (TPH-R) berjumlah 42 unit aktif. Namun seluruh RPH-R di Provinsi Riau belum bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan tidak melakukan pengujian keamanan dan mutu produk secara rutin dan sebagian besar RPH-R belum bersertifikasi Halal. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya persentase produk pangan asal ternak ASUH yang beredar di Provinsi Riau.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang ASUH adalah :

1. Advokasi penindakan hukum terhadap praktik penyimpangan kesmavet dalam mata rantai penyediaan produk pangan asal hewan yang ASUH belum terlaksana.
2. Kondisi eksisting fisik RPH-R; bangunan kurang layak (aspek bangunan, lokasi, sarana, higiene dan sanitasi, lingkungan serta suplai air bersih). Pada bangunan RPH-R yang baru dibangun; konstruksi dan desain tidak sesuai dengan persyaratan teknis (misalnya : tidak sesuai alur proses dan operasionalisasinya tidak sesuai SOP yang ditetapkan).
3. Belum semua kabupaten/kota memiliki RPH-R dan belum ada satu pun RPH-R yang bersertifikasi NKV.

4. Keterbatasan SDM lingkup bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup dinas provinsi maupun dinas kabupaten/kota.
5. Kesadaran pelaku unit usaha terhadap penerapan hygiene sanitasi, keamanan dan mutu pangan serta penerapan kesejahteraan hewan masih belum merata disetiap unit usaha.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah :

1. Mensosialisasikan proses advokasi regulasi terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terhadap seluruh *stakeholder*.
2. Mengoptimalkan peran masing-masing SDM yang tersedia sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk pembagian tugas kegiatan.
3. Memfasilitasi dinas kabupaten/kota untuk mendapatkan dana dari APBN untuk pembangunan dan rehabilitasi RPH-R serta restrukturisasi manajemen RPH-R melalui perbaikan manajemen operasional : penguatan SDM, kelembagaan, sarana prasarana dan regulasi/peraturan pemerintah.
4. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kesadaran dan sosialisasi edukasi kepada stakeholder kesmavet, penguatan jejaring pengawasan lintas bidang.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel.3.8. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	75.514 Ton	77.838 Ton*	103,08%	19.010.104.247	18.409.502.413	96,84%
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	97,3%	97,2%	99,9%	2.975.373.427	2.819.388.103	94,76%
		Persentase produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%	4,48%	89,6%	959.925.744	837.762648	87,27%

Dari Tabel 3.8. dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging, capaian kinerjanya melebihi target sampai 103,08% dan penyerapan anggarannya hanya 96,84%, dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien.

Sedangkan pada sasaran strategis meningkatnya status kesehatan hewan, capaian Kinerjanya tercapai dengan tingkat capaian 99,9% dengan penggunaan anggaran 93,12% . Pada indikator Persentase produk hewan yang ASUH capaian kinerja tidak tercapai hanya mencapai 89,6% dengan realisasi keuangan 87,27% sehingga belum bisa dikatakan efisien karena target kinerjanya tidak tercapai. Analisis efisiensi dilakukan bila capaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan dengan penggunaan anggaran kurang dari anggaran yang tersedia.

Pada Tahun 2023, analisis efisiensi dapat dilakukan pada sasaran meningkatnya produksi daging dengan indikator produksi daging dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.9. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging	103,08%	96,84%	6,24 %

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Produksi Daging sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja produksi daging sebesar 103,08%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan serapan anggaran sebesar 96,84% dengan tingkat efisiensi mencapai 6,24%.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Produksi Daging

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yakni pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging dengan Indikator Kinerja

Produksi daging pencapaiannya ditunjang dari 3 (tiga) Program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk turut mendukung pencapaian peningkatan produksi daging adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	62.303	77.837	132.40	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1,85	0,75	40,54	12.803.325.346	12.455.484.948	97,28
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	2	2	100	21.450.000	18.401.580	85,79
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	1	1	100	21.450.000	18.401.580	85,79
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	1250	1203	96,24	1.297.471.276	1.193.139.943	91,96
					Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (dosis)		42000	52444	124,87				
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	13	13	100	1.297.471.276	1.193.139.943	91,96

						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13,1	10,37	79,16	2.597.871.570	2.520.844.622	97,39
						Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)	36	36	100	2.547.071.570	2.479.067.122	98,03
						Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	2	2	100	50.800.000	41.777.500	82,24
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)	513	499	97,27	8.886.532.500	8.723.098.803	98,16
							Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	6	6	100			
						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	12589	10209	81,09	8.886.532.500	8.723.098.803	98,16
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	27	25,75	95,37	3.882.830.825	3.685.429.945	94,92
						Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	27	31,25	115,74	3.882.830.825	3.685.429.945	94,92
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1	100	504.438.798	361.169.087	71,60
						Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	1	1	100	218.000.000	211.707.218	97,11

						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	10	10	100	3.160.392.027	3.112.553.640	98,49
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Peternak yang menerapkan sistem agribisnis (Persen)	5	4	80	2.313.948.076	2.268.587.520	97,91
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	65	65	100	2.203.380.410	2.167.660.125	98,24
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	661	661	100	2.203.380.410	2.167.660.125	98,24
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelompok Ternak yang Menerapkan Sistem Agribisnis (Kelompok)	25	26	104	110.567.666	100.927.395	91,28
						Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)	12	12	100	110.567.666	100.927.395	91,28

Dari Tabel 3.10. terlihat bahwa untuk meningkatkan produksi daging, program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian.

Outcome yang diharapkan dari ketiga program ini adalah adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran baik yang berasal dari Inseminasi Buatan ataupun yang berasal dari kawin alam. Pada tahun 2023 terjadi penambahan kelahiran sapi sebanyak 21.951 ekor baik yang berasal dari Inseminasi Buatan maupun dari kawin Alam sebagai outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahun 2023 capaian sasaran strategis angka produksi daging sudah mencapai target bahkan melebihi target mencapai 103,08%. Produksi daging dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung mengalami kenaikan. Sub Kegiatan yang menunjang peningkatan produksi daging pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan dengan capaian kinerja 100%, Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja 100%, Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak



dengan capaian 100%, Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan capaian kinerja 100%. Namun pada kegiatan Penyediaan benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain capaian kinerjanya 81,09%.

Sedangkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian seluruh Sub Keegiatannya mencapai target 100%, terdiri dari sub kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan capaian

Pelaksanaan IB pada ternak



kinerja 100% dan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya dengan capaian 100%.

Pada Program Penyuluhan Pertanian, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani capaiannya 100% dimana kelompok petani yang mendapat penyuluhan sebanyak 661 kelompok. Pada sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Korporasi Petani capaian kinerjanya 100%.

Secara umum kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi daging terlaksana dengan baik. Dengan capaian kinerja yang tinggi dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada ketiga program tersebut memberi pengaruh yang besar pada outcome peningkatan populasi dan produksi daging.

Namun pada tahun 2023 ini, capaian program peningkatan populasi ternak tidak tercapai dimana seharusnya populasi meningkat sebesar 1,85% namun kenyataannya realisasi peningkatan populasi ternak hanya 0,75%. Belum tercapainya target peningkatan populasi salah satunya disebabkan karena terjadinya wabah penyakit Septicaemia Epizootical (SE) atau lebih umum disebut penyakit ngorok pada ternak kerbau sehingga populasi kerbau menurun. Penurunan populasi kerbau terjadi karena banyaknya ternak yang dipotong untuk dikonsumsi dan juga ternak yang mati karena wabah penyakit SE (*Septicaemia Epizootica*) / Penyakit Ngorok pada kerbau. Pertambahan ternak dari kelahiran dan pemasukan ternak tidak sebanding dengan pengurangan dari pemotongan dan juga kematian ternak akibat wabah penyakit SE. Upaya untuk meningkatkan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan mengalami kendala karena sebagian besar kerbau dipelihara dengan cara dilepas sehingga peternak tidak mengetahui kapan kerbaunya birahi dan menyulitkan petugas untuk melakukan Inseminasi Buatan

b. Program/Kegiatan yang mendukung Peningkatan Status Kesehatan Hewan dan Peningkatan Produk Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal.

Pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH) didukung oleh Program `Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.



Pelayanan Medik di UPT LVKH

Sub Kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mendukung pencapaian peningkatan status kesehatan hewan adalah Sub Kegiatan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi.

Sub kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mendukung pencapaian peningkatan produk hewan yang Aman, sehat, Utuh dan Halal (ASUH) adalah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan dan Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis.

Tabel 3.11. Program/Kegiatan yang Mendukung Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sasaran Strategis Ke-2)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RELISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	97,3%	97,2%	99,9%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen)	2,50	2,20	112,00	3.802.098.067	3.540.339.488	93,12
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	10	37,39	373,90	2.392.904.677	2.281.328.603	95,55
						- Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	48	48	100,00	2.392.904.677	2.281.328.603	96,50
						- Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	24	24	100,00	63.670.000	48.774.960	76,61
						Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	80,00	82,25	102,81	582.468.750	538.059.500	92,38
						- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (Laporan)	60,00	60,00	100,00	582.468.750	538.059.500	92,38

		2. Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (%)	5,00	4,48	89,6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	10	17,24	172,40	133.201.104	116.811.263	87,7
						Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	20	32	160,00	826.724.640	720.951.385	87,21
						- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	260	298	114,62	826.724.640	720.951.385	87,21
						Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	27	34	125,93	133.201.104	116.811.263	87,70
						- Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan (Sertifikat)	25	25	100,00	64.148.000	48.820.982	76,11
						- Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	30	30	100,00	69.053.104	67.990.281	98,46

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa dalam rangka Menjamin Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, didukung dengan **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** dengan indikator angka kematian ternak dan persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk. Capaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner telah melebihi target dimana angka kematian ternak 2.2% sementara targetnya 2,5% sehingga capaian kinerjanya 112%. Sedangkan pada indikator persentase peningkatan unit usaha yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk capaian kinerjanya sangat tinggi dimana dari 10% peningkatan yang ditargetkan dapat terealisasi 17,24% peningkatan unit usaha yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk sehingga capaian kinerjanya menjadi 172,4%.

Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, seluruh sub kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada kegiatan realisasinya jauh melebihi target. Sub kegiatan yang capaiannya melebihi target yakni sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan capaian 114,62%. Dengan capaian kinerja program yang tinggi juga memberi pengaruh pada penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Disamping ke empat program di atas, sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga didukung oleh anggaran APBN yang terdiri dari tiga program sebagai berikut :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan terdiri dari :
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan.
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
 - Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak.
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Dukungan Manajemen, dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.



Gambar 3.6. Pelayanan Medik di UPT LVKH



Gambar 3.7. Pengambilan Sampel Pullorum



Gambar 3.9. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dengan vaksinasi ternak



Gambar 3.10. Pelaksanaan Penanggulangan PMK

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 alokasi dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.53.229.033.941,-. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2023 memiliki 5 Program dengan 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp 51.683.986.153,- dan dengan tingkat capaian 97,1%.

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023

	PROGRAM	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.803.325.346	12.455.484.948	97,28
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.882.830.825	3.685.429.945	94,92
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.935.299.171	3.657.150.751	92,93
4	Program Penyuluhan Pertanian	2.313.948.076	2.268.587.520	98,04
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.293.630.523	29.617.332.989	97,77
	TOTAL	53.299.033.941	51.683.986.153	97,10%

Dari Tabel 3.11. dapat dilihat realisasi anggaran per program sebagai berikut :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian jumlah pagu Rp.12.803.325.346,- dengan realisasi Rp. 12.455.484.948,- (97,28%)
- Program Penyuluhan Pertanian pagu Rp2.313.948.076,- dengan realisasi Rp.2.268.587.520,- (98,04%).
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pagu Rp3.882.830.825,- dengan realisasi Rp.3.685.429.945,- (94,92%).
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pagu Rp.3.935.299.171,- dengan realisasi Rp.3.657.150.751,- (92,93%).

- e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp.30.293.630.523,- dengan realisasi keuangan Rp.29.617.332.989,- (97,10%).

Disamping dana dari APBD Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memperoleh dana untuk pembangunan peternakan dan kesehatan yang berasal dari dan APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Alokasi anggaran pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp.14.157.802.000,- (Empat Belas Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah). Pada APBN Perubahan anggaran menjadi Rp.12.888.725.000,-(Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi keuangan dari anggaran tersebut sebesar Rp. 12.640.467.673,- atau 98,07% dengan realisasi fisik 98,38%.

Tabel.3.13. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2023

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik %
		Rp	%	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS				
1. Peningkatan Produksi Pakan	460.000.000,-	456.017.791,-	99.13	100
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	6.662.775.000,-	6.658.619.401,-	99.94	100
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi	4.888.904.000,-	4.678.068.277,-	95.69	97.99
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	433.500.000,-	405.417.808,-	93.52	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditien Peternakan	288.546.000,-	287.852.896,-	99.76	100
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI				
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	155.000.000,-	154.491.500,-	99.67	100
Jumlah	12.888.725.000,-	12.640.467.673,-	98.07	98.38

BAB IV

PENUTUP

Bab IV berisi :

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Langkah Strategis

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran strategis, dengan tiga indikator kinerja utama diketahui bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya produksi daging dengan indikator produksi daging menunjukkan hasil kinerja yang sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja produksi daging 103,08%. Sasaran strategis terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja utama persentase status Kesehatan hewan menunjukkan capaian kinerja termasuk pada kategori Sangat Tinggi dengan capaian kinerja 99,9%. Walaupun capaian kinerja sudah masuk pada kategori sangat tinggi tapi masih harus terus dilakukan peningkatan hingga capaian kinerja 100% atau bahkan lebih dari 100%. Pada indikator kinerja persentase produk pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tingkat capaian 89,6% belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Permasalahan utama dalam peningkatan produksi daging adalah lambatnya pertumbuhan populasi ternak karena angka kelahiran ternak yang masih

tergolong rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta belum diterapkannya GFP oleh peternak akibat keterbatasan pengetahuan dan modal peternak dalam menerapkan GFP. Hal lain yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan populasi karena terjadinya wabah penyakit Septicaemia Epizootical (SE) atau lebih umum disebut penyakit ngorok pada ternak kerbau sehingga populasi kerbau menurun. Penurunan populasi kerbau terjadi karena banyaknya ternak yang dipotong untuk dikonsumsi dan juga ternak yang mati karena wabah penyakit SE (*Septicaemia Epizootica*)/ Penyakit Ngorok pada kerbau.

3. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalu lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
4. Permasalahan utama dalam pemenuhan produk pangan yang ASUH adalah karena belum ada Rumah Potong Hewan ruminansia yang bersertifikat NKV dan masih minimnya unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis NKV karena kurangnya kesadaran pelaku usaha.

4.2. Langkah Strategis

Langkah strategis yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1. Untuk mengantisipasi lambatnya laju pertumbuhan populasi khususnya sapi potong maka perlu pembenahan dalam sistem perbibitan. Untuk itu perlu peningkatan kerjasama dengan pihak perkebunan dan agroindustri perkebunan sebagai sumber bahan pakan dan Kawasan pengembangan peternakan yang difasilitasi pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat. Disamping itu perlu juga peningkatan kemampuan SDM peternak dan aparat Pembina, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan peternak, serta peningkatan fasilitas penunjang peternakan dalam rangka pengembangan peternakan khususnya dalam penyediaan bibit dan bakalan.
2. Dalam upaya mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu

ditingkatkan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
4. Memfasilitasi dinas kabupaten/kota untuk mendapatkan dana dari APBN untuk pembangunan dan rehabilitasi RPH-R serta restrukturisasi manajemen RPH-R melalui perbaikan manajemen operasional : penguatan SDM, kelembagaan, sarana prasarana dan regulasi/peraturan pemerintah